



3

**MANUAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
INSPEKTORAT INVESTIGASI**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)

Sasaran Program (SP)	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal
Kode IKSP	IKSP1
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (7%)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSP	Hasil survey persepsi korupsi masyarakat terhadap Kementerian Pertanian yang diapat dari survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner persepsi korupsi (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai persepsi korupsi untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$ 4. Hitung tingkat persepsi korupsi untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat persepsi korupsi untuk seluruh pertanyaan → Tingkat kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Inspektorat Investigasi
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terdapat pada LHE Menpan RB tentang pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian pertanian, atau • Mengambil nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan survey eksternal yang dilakukan KPK, atau • Melakukan survey persepsi korupsi dan memasukkan hasil survey berupa Nilai IPK sebagai realisasi IKSP ini.
Catatan khusus	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) didapat melalui survey eksternal kepada masyarakat terkait persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diisi menggunakan skala 0-4, dimana nilai 7% secara utuh akan didapat jika seluruh responden menjawab 4 atas pertanyaan terkait persepsi korupsi terhadap Kementerian Pertanian.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSP/pengambilan data IKSP	Inspektorat Investigasi

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal
Kode IKSK	IKSK2
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Peningkatan nilai penguatan pengawasan internal (12%)
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Surat Edaran (SE) Menpan RB tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
Formula/Cara menghitung	<p>Mengambil nilai penguatan pengawasan internal pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan LHE tersebut, maka formula Nilai penguatan pengawasan internal adalah:</p> <p>(1,5% x Nilai penanganan gratifikasi) + (1,5% x Nilai penetapan SPIP) + (2% x Nilai pengelolaan pengaduan masyarakat) + (1,5% x Nilai penerapan WBS) + (1,5% x Nilai penanganan benturan kepentingan) +(2% x Nilai pembangunan zona integritas) +(1,5% x Nilai implementasi APIP)</p>
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Inspektorat Investigasi
Cara pengambilan data	Mengambil nilai penguatan pengawasan internal pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
Catatan khusus	<p>Berdasarkan LHE Menpan RB tentang evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, nilai penguatan pengawasan internal dinilai berdasarkan 7 (tujuh) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gratifikasi (1,5%) 2. Penetapan SPIP (1,5%) 3. Pengaduan masyarakat (2%) 4. <i>Whistle-Blowing System</i> (WBS) (1,5%) 5. Penanganan benturan kepentingan (1,5%) 6. Pembangunan zona integritas (2,5%) 7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (1,5%)
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Inspektorat Investigasi